

Forum Freedom 55, 05 Juni 2006

**Tema: Privatisasi dalam kasus Semen Padang**

**Nara sumber : Wahyu Prasetyawan**

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

**Hamid Basyaib**

Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan Forum Freedom. Satu program kerjasama antara Freedom Institut dan kantor berita Radio 68 H. *Host*-nya masih Hamid Basyaib. Tamu saya kali ini DR. Wahyu Prasetyawan. Ia baru saja lulus Ph.d dari Kyoto University. Sekarang ia menjadi peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia (LSI). Selamat pagi...

**Wahyu Prasetyawan**

Selamat pagi...

**HB**

Kita mau bicara soal privatisasi. Khususnya dalam kasus Semen Padang. Kasus Semen Padang ini adalah satu dari tiga kasus yang Anda teliti untuk keperluan disertasi Anda. KPC, Caltex, dan Semen Padang. Minggu lalu Anda pun menyinggung sedikit persoalan yang melanda Semen Padang. Tapi tampaknya masalahnya tidak sedikit. Mudah-mudahan di situ kita bisa melihat bagaimana situasi privatisasi di Indonesia pada umumnya; dan bagaimana masalah ini sebaiknya ditangani. Tampaknya ada kebuntuan berlarut-larut dan banyak faktor yang terlibat. Ada soal etnisitas, daerah, dsb. Pertanyaan pertama saya: Anda kelihatannya termasuk yang mendukung privatisasi. Kenapa Anda mendukung privatisasi?

**WP**

Peran pemerintah dalam urusan ekonomi itu sebaiknya tidak usah terlalu banyak. Sekarang bukan zamannya lagi pemerintah menjadi aktor ekonomi. Pemerintah sebaiknya lebih sebagai regulator atau produsen peraturan ketimbang pemain langsung. Kalau kita perhatikan misalnya, hampir di sebagian besar di dunia ketiga kalau birokrat negara mengelola perusahaan-perusahaan, itu biasanya cenderung merugi.

**HB**

Karena enggak efisien?

**WP**

Ya. Juga karena enggak ada sistem *reward* dan *punishment*. Jadi kalau perusahaan BUMN merugi, gajinya enggak turun. Tunjangannya tetap.

**HB**

Kalau perusahaannya untung, dia dapat bonus?

**WP**

Dapat bonus. Beda dengan di perusahaan swasta. Di swasta, kalau perusahaannya rugi, gaji harus dipotong. Jadi *punishment*-nya jelas. Kalau performa atau kinerja Anda jelek,

Anda harus terima resikonya (dapat upah sedikit). Kalau bagus, Anda dapat bonus. Itu jelas.

**HB**

Kalau perusahaan negara ada masalah, terus ditalangi sama pemerintah?

**WP**

Ya. Jadi membebani pembayar pajak. Kasihan sekali misalnya orang seperti Mas Hamid harus membayar pajak, dan pajak itu digunakan untuk menalangi perusahaan-perusahaan yang merugi.

**HB**

Seperti kita ketahui bahwa BUMN di Indonesia berjumlah 160-an. Kita pun tahu bahwa pemain terbesar di dalam negeri ini masih BUMN. Dalam disertasi Anda yang berjudul *Politic and Bussines in Decentralizing Indonesia 1998-2004*, apakah Anda menyebut (berapa) nilai BUMN?

**WP**

Sebetulnya saya tidak langsung meneliti BUMN. Karena itu bukan konsen yang utama. Tapi maksud saya begini: ketika Semen Padang masuk, itu menjadi kasus yang menarik. Bukan karena BUMN-nya. Tapi kasus privatisasinya. Dia (perusahaan Semen Padang) masuk dalam salah satu kasus yang saya teliti karena ada regulasi pemerintah pusat yang ditentang oleh pemerintah yang lebih bawah. Dan itu secara umum mengacaukan situasi investasi. Jadi saya tidak begitu banyak mendalami BUMN.

**HB**

Ok, kalau gitu kita akan masuk kasus Semen Padang. Kira-kira duduk perkaranya seperti ini: Semen Padang ini dimiliki oleh Semen Gresik. Kemudian ada investor masuk, namanya semen Meksiko (perusahaan Cemex [?]). Perusahaan Cemex itu membeli kira-kira 25 persen saham pada Semen Gresik. Dengan demikian perusahaan itu memiliki Semen Padang. Lalu bagaimana situasinya sekarang?

**WP**

Situasi yang terjadi sekarang adalah adanya pertarungan antara pemerintah pusat dan Cemex. Cemex kan sudah menawarkan 24,9 sahamnya ke pihak swasta Indonesia. Tapi pihak kementerian BUMN menginginkan (saham/Semen Padang) itu dibeli oleh pemerintah.

**HB**

Mengapa Cemex ingin menjual lagi? Apakah karena ada keuntungan atau ada faktor lain?

**WP**

Saya ingin bercerita ini. Kasus ini bisa dilacak sejak tahun 2001. Malah sebenarnya bisa dilacak tahun 1998. Dalam perjanjian bisnisnya yang disingkat CSPA (?) itu, Cemex sebenarnya bisa membeli saham lebih banyak lagi. Nah, yang jadi masalah ketika Cemex akan mengeksekusi itu, Cemex ditentang oleh elite-elite di Padang. Alasan mereka: tanah yang dijadikan bahan baku untuk semen itu hak ulayat. Tanah adat. Mereka tidak menginginkan saham itu dibeli Cemex. Kalau *put option*-nya dilakukan, berarti itu menjual tanah adat kepada pihak asing. Itu alasan mereka. Entah benar entah tidak, itu sebenarnya bisa didiskusikan.

**HB**

Jadi belum pasti tanah adat?

**WP**

Itu sudah pasti tanah adat. Tapi kan ada mekanisme-mekanisme ekonomi yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang terjadi di Padang dengan adanya maklumat affairs (?) atau peristiwa maklumat itu, mengambil alih Semen Padang kepada orang pusat. Itu kan pencurian besar-besaran. Mereka tidak punya hak untuk mengambil. Enggak ada satu hukum pun yang membenarkan pengambilan itu.

**HB**

Itu sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh pihak Cemex sebagai investor?

**WP**

Sebenarnya Cemex sudah mencium gejala itu. Tapi dia tidak menduga kalau itu akan diambil. Bayangkan jika Anda berinvestasi, tapi bagian dari perusahaan Anda diambil orang lain tanpa proses legal yang benar.

**HB**

Sekarang Cemex sudah enggak tahan dengan situasi yang ruwet ini, dan dia mau melepas 24,9 persen sahamnya kepada pihak swasta. Lalu apa masalahnya sekarang?

**WP**

Masalahnya ada pihak-pihak di Indonesia yang menginginkan saham itu dijual ke pemerintah. Itu satu. Kedua, perusahaan Semen Padang itu bisa *aja* dijual ke perusahaan daerah. Tapi pertanyaannya begini: kalau kita berbicara privatisasi yang dicanangkan Pak Tanri Abeng tahun 1998, saat itu negara kita sedang defisit.

**HB**

Mengapa pihak Cemex perlu memilih-milih pembeli? Mengapa mereka cenderung ingin menjual pada pihak swasta dan enggak pada pemerintah?

**WP**

Dengan privatisasi kan sebenarnya pemerintah ingin mencari uang untuk menutup defisit anggaran. Kalau *ujug-ujug* pemerintah mau beli lagi, duitnya dari mana? Ini aneh. Tujuan privatisasi kan menjual, bukan membeli.

**HB**

Apakah pihak pemerintah bernafsu membeli lagi?

**WP**

Kalau dari berita-berita yang saya amati, suara-suara itu cukup kuat. Ada pihak-pihak yang menginginkan itu dibeli pemerintah. Pertanyaannya sekarang: kalau ada dananya, apakah prosesnya bisa cepat? Karena, menurut aturan sekarang, itu harus disetujui DPR. Karena (pembelian) itu berdasarkan/dari APBN.

**HB**

Pasti dari APBN. Karena anggarannya/harganya tidak kecil. Mungkin 40 juta dollar. Nah, saham pemerintah sendiri sekarang berapa? Apakah masih dominan?

**WP**

Ya, sekitar 60 persen-an.

**HB**

Dan sekarang pemerintah ingin memperbesar sahamnya menjadi 60 persen?

**WP**

Iya. Jadi sekarang hanya 15-20 persen yang diperdagangkan di bursa saham. Itu sebetulnya ingin mengontrol.

**HB**

Anda kelihatannya enggak setuju?

**WP**

Kita kembalikan pada peran pemerintah. Pemerintah itu kan harus menjaga *rule of law*. Dulu niatnya mau privatisasi, *kok* sekarang mau beli lagi. Gimana mau menjaga *rule of law*? Aturannya gimana? Itu satu. Kedua, uangnya dari mana? Sumber-sumbernya dari mana? Ketiga, yang ingin saya tekankan bahwa pemerintah sebaiknya tetap konsisten dengan privatisasi. Enggak usah dibeli lagi. Itu kan bermanfaat buat pemerintah.

**HB**

Juga buat rakyatnya?

**WP**

Mudah-mudahan. Tapi paling enggak, pemerintah lebih fokus (pada urusan yang lebih penting).

**HB**

Ini agak aneh. Dulu semangat besarnya privatisasi. Jadi urusan dagang biar diurus oleh pedagang. Bukan oleh negara. Negara sebaiknya lebih fokus pada urusan politik dan keamanan. Kita seringkali memperbincangkan persoalan ini dengan DR. Chatib Basri, DR. Rizal Malarangeng, dst. Ya, intinya pemerintah itu sebaiknya tidak berdagang. Baiknya jadi wasit saja. Nah, sekarang ada tarikan-tarikan yang mengatasnamakan nasionalisme. Kita tahu bahwa privatisasi (perusahaan yang diprivatisasi) itu kan akhirnya kebanyakan dimiliki oleh asing. Kemudian mereka yang menentang privatisasi ini menganggap bahwa negara sedang digadaikan. Lebih ekstrim lagi, mereka bilang bahwa privatisasi ini adalah bentuk penjajahan baru. Dulu dengan senjata dan sekarang dengan ekonomi. Lalu bagaimana komentar Anda?

**WP**

Ini perlu diluruskan. Kita tahu bahwa Semen Gresik itu bukan negara. Semen Gresik kan hanya aset ekonomi. Yang dibeli oleh mereka (pihak asing) itu bukan negara, tapi saham.

**HB**

Jadi secara teknis negara mustahil diperjualbelikan?

**WP**

Dulu terjadi di Amerika, di negara bagian milik Spanyol. Itu dulu, 200 tahun lalu. Ini kan saham. Yang dibeli Cemex kan saham. Kita pun susah menerima bila negara *equal* dengan saham. Jadi hanya unit ekonomi yang dijual, bukan negara. Transaksi (penjualan saham) ini kan bermanfaat buat rakyat. Kalau perusahaan itu untung, pajak yang dikeluarkannya juga besar.

**HB**

Jadi tetap saja kita yang mengambil keuntungan dari pajak itu?

**WP**

Iya.

\*\*\*

**HB**

Tadi Bung Wahyu sudah ngomong soal kemustahilan sebuah Negara atau kedaulatan bisa diperjualbelikan. Sebetulnya yang terjadi hanyalah jual saham. Itu sama sekali bukan jual negara. Kita terlalu picik kalau menerjemahkan negara sebagai saham-saham satu perusahaan. Dengan kata lain Bung Wahyu ini lebih menyetujui privatisasi. Mengapa Anda begitu setuju dengan privatisasi? Apakah dalam keyakinan Anda privatisasi itu lebih menguntungkan atau lebih bisa menjamin kesejahteraan rakyat?

**WP**

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengulas sedikit tentang BUMN (?). Kita tahu bahwa BUMN di Indonesia menjadi kerajaan kecil. Itu menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli BUMN. BUMN menjadi kerajaan kecil dan sangat susah dirubah *mainset*-nya. Misalnya BUMN Perkebunan. Itu kan mewarisi semangat Belanda. Ada administraturnya, dsb.

**HB**

Jadi VOC baru?

**WP**

Saya enggak berani bilang begitu. Tapi begini: dia ada aturan-aturan sendiri yang tidak kompatibel dengan dunia bisnis yang mengejar efisiensi. Target efisiensinya agak susah dicapai kalau BUMN itu dijalankan dengan mental birokrat.

**HB**

Lalu apa hubungannya dengan kesejahteraan rakyat?

**WP**

Saya masih percaya bahwa instrumen yang dipegang oleh negara untuk mensejahterakan rakyat itu pajak. Jadi pajak, *income*. Maksud saya, rasio *income* dari pajak juga harus tinggi. Kalau banyak perusahaan yang beroperasi, pajak pun tinggi. Itu menguntungkan. Artinya pajak yang ditarik oleh negara dari kegiatan bisnis. Efek-efek tidak langsung dari pajak itu bisa didistribusikan kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jadi jangan membayangkan negara itu ngasih duit kepada Anda.

**HB**

Ada mekanismenya?

**WP**

Ada. Misalnya begini: kita kan akan lebih sejahtera kalau Jakarta enggak macet. Kemudian ada subway. Ini karena pemerintah pusat dan DKI mempunyai dana yang

cukup dari pajak untuk membiayai pembangunan subway. Jakarta jadi nyaman. Kita enggak usah nyetir tiap hari.

**HB**

Duduk perkaranya begini: ada satu perusahaan ditangani langsung oleh negara. Di sini negara yang berdagang langsung, seperti yang terjadi dulu di Sovyet, Cina, India. Tapi akibatnya jelas. Akibatnya, perusahaan itu kinerjanya buruk, rugi besar, dan bangkrut. Tapi sebaliknya. Ada satu perusahaan yang diswastakan; dikelola oleh pedagang professional. Itu akan untung. Kalau perusahaan untung, maka negara bisa mengambil pajak lebih banyak. Jadi sesederhana itu?

**WP**

Jadi apa lagi yang harus dilakukan negara selain menarik pajak..

**HB**

Duduk perkaranya sebetulnya sederhana. Tapi mengapa ada resistensi besar dari birokrat kita sendiri, tokoh partai politik, dan aktifis-aktifis LSM?

**WP**

Mungkin kita punya sejarah yang enggak terlalu bagus. Anda ingat enggak, ada disertasi yang ditulis orang Amerika tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda di zaman orde lama. Kita punya preseden buruk. Itu kan semangatnya sama saja dengan menolak privatisasi. Artinya, negara pada waktu itu memang mengurus masalah ekonomi. Mungkin zaman dulu kita enggak punya satu bagian dari populasi yang punya keterampilan untuk melaksanakan perusahaan-perusahaan itu. Karena waktu itu sebagian besar diisi oleh orang asing. Tapi sekarang banyak profesional-profesional handal..

**HB**

Artinya secara teknis kita mampu?

**WP**

Mampu. Walaupun ada keterbatasan-keterbatasan. Kalau misalnya perusahaan kita dibeli oleh perusahaan asing, kita kan bisa diuntungkan dengan jaringan pemasaran yang mereka miliki. Anda bayangkan misalnya Semen Padang dikelola oleh orang Padang. Memang dia mampu menjual sampai ke Korea, Amerika. Mereka enggak punya jaringan pemasaran yang luas. Sementara pemain asing besar itu punya jaringan distribusi yang lebih bagus karena sudah mengglobal. Kita sebenarnya bisa belajar pelan-pelan dari situ. Kalau saham perusahaan itu mau dibeli lagi oleh orang Indonesia, itu sangat bisa. Itu bukan persoalan sulit.

**HB**

Tapi oleh swasta Indonesia?

**WP**

Ya. Dibeli lagi oleh swasta Indonesia yang telah belajar dari mereka (asing).

**HB**

Pemerintah dalam kasus Semen Padang sudah melepaskan sahamnya 24,9 persen pada Cemex, lalu tiba-tiba pemerintah mau beli lagi. Ini agak aneh..

**WP**

Mungkin suara nasionalisme...

**HB**

Kalau yang membelinya pengusaha swasta lokal, Anda setuju?

**WP**

Siapa pun pembelinya selain negara, saya enggak keberatan. Pemerintah sebaiknya membatasi diri saja. Pemerintah tugasnya sudah cukup banyak. Jadi enggak usah mengurus saham Cemex yang jumlahnya 24,9 persen. Banyak tugas yang lebih penting yang harus diselesaikan pemerintah. Kelaparan, kemiskinan, dan kesejahteraan. Tingkat literasi yang masih rendah; pendidikan yang kacau balau; kesehatan yang memprihatinkan. Itu kan tugas pokok pemerintah. Jadi buat apa ngurusin saham 24 persen...

**HB**

Jadi BUMN-BUMN itu mestinya diprivatisasi ya?

**WP**

Ya, secara bertahap. Itu bisa merubah *mainset* para pelaku bisnis di BUMN. Karena kulturnya lain. Kalau ada suntikan darah baru dari luar, itu biasanya lebih *fresh*. Lebih lincah. Kita tahu bahwa birokrasi di Indonesia sangat gemuk. Ada motto, kalau bisa susah, kenapa dibuat gampang. Bisnis enggak bisa begitu. Bisnis harus cepat.

**HB**

Kita tahu bahwa kebajikan-kebajikan atau manfaat-manfaat privatisasi itu sudah sangat jelas. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain semisal Eropa Barat. Karena itu banyak yang curiga (dengan tidak diberlakukannya privatisasi) ini. Jangan-jangan ini mau dijadikan *cashcow* (?) atau sapi perahnya para pejabat negara dan elite parpol. Kemudian mereka menolak privatisasi dan berkoar-koar mengatasnamakan martabat dan kedaulatan. Anda curiga dengan itu?

**WP**

DR. Sjahrir sangat curiga dengan itu. Menurutnya, BUMN itu sebetulnya jadi *cashcow* saja. Misalnya di era orde baru, banyak proyek-proyek enggak jelas; keuntungan dibagi pada pihak-pihak yang memiliki *privilege*; kontrak-kontrak tanpa tender diberikan kepada kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

**HB**

Jadi resistensi terhadap penjualan saham-saham negara itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan argument-argumen nasionalisme, martabat bangsa, dst..

**WP**

Itu kan wacana yang dikembangkan. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya ada orang-orang yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap BUMN. Misalnya di Padang. Di sana ada pemasok batu bara; ada distributornya, dan mereka itu yang menolak privatisasi Semen Padang. Itu jelas.

**HB**

Juga ada beberapa politisi?

**WP**

Iya.

**HB**

Itu duduk perkaranya. Anda banyak mengemukakan argument-argumen ekonomi yang rasional. Tapi kalau ternyata masalah yang lebih besar dan nyata sebetulnya adalah masalah politik seperti yang kita bicarakan tadi, lalu bagaimana saran Anda untuk mengatasi ini?

**WP**

Ini agak sulit. Ini bukan hanya persoalan ekonomi. Ini kepentingan politik juga. Persoalan politik. Jadi penyelesaiannya harus penyelesaian politik. Tapi pertanyaannya: apakah pemerintah pusat itu mau menyelesaikan persoalan-persoalan politik tadi? Penyelesaiannya memang bukan ekonomi. Ini penyelesaian politik. Ini *beyond law*. *Deal* di belakang. Artinya, partai politik juga harus menahan diri untuk tidak berpraktek seperti zaman dulu. Sekarang kalau cari dana harus legal...

**HB**

Ada semacam balas dendam. Para pendahulu mereka sangat makmur hanya dengan menelpon seorang dirut BUMN. Tapi sekarang mereka enggak kebagian?

**WP**

Kasihannya sama BUMN-nya. Perusahaan Negara itu enggak untung-untung...

**HB**

Kongkritnya apa yang harus dilakukan?

**WP**

Semua kembali ke presiden. Kalau dia mendapat informasi yang jelas mengenai persoalan ini, dia harus segera mengambil keputusan dan mengambil tindakan tegas. Dia harus berani.

**HB**

Begitulah akhir dari Forum Freedom. Terima kasih...